

ANALISIS PENGARUH PENGELOUARAN PEMERINTAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SEKAWASAN DANAU TOBA

Darwin Damanik^{1*}, Pawer Darasa Panjaitan², Elidawaty Purba³

^{1,2,3}Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

*Email: darwin.damanik@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sekawasan Danau Toba pada tahun 2015 - 2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu tahun 2015 - 2022 yang kemudian dianalisis menggunakan regresi data panel dengan bantuan Eviews 10. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan (Uji f) variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_1), variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_2) dan variabel pengeluaran pemerintah sektor pariwisata (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sekawasan Danau Toba. Namun secara parsial (Uji t) pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sekawasan Danau Toba, tetapi pengeluaran pemerintah sektor pariwisata tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sekawasan Danau Toba.

Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah, Kesejahteraan Masyarakat, Indeks Pembangunan
Manusia, Panel Data

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of government spending in the education sector, health sector and tourism sector on community welfare in the Lake Toba Regency in 2015 - 2022. This research uses quantitative methods and the type of data used in this research is secondary data originating from the Directorate General of Financial Balance (DJPK) of the Ministry of Finance and the Central Statistics Agency (BPS). The type of data used is panel data, namely 2015 - 2022 which is then analyzed using panel data regression with the help of Eviews 10. The results of this research show that simultaneously (F Test) the government expenditure variable in the education sector (X_1), the health sector government expenditure variable (X_2) and the tourism sector government expenditure variable (X_3) have a positive and significant effect on the welfare of the community in the Lake Toba Region Regency. However, partially (F test) government spending in the education sector and government spending in the health sector have a positive and significant effect on community welfare in the Lake Toba Region District, but government spending in the tourism sector is insignificant or has no effect on community welfare in the Lake Toba Region District.

Keywords: Government Expenditure, Welfare, Human Development Index, Data Panel.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi dalam perspektif modern tidak lagi hanya berfokus pada pertumbuhan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), melainkan telah beralih ke arah pembangunan yang inklusif dan berpusat pada manusia (human-centered development). Kesejahteraan masyarakat menjadi indikator fundamental keberhasilan pembangunan suatu

daerah. Di Indonesia, salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mengintervensi tingkat kesejahteraan adalah melalui alokasi belanja publik atau pengeluaran pemerintah. Secara teoretis, kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah berfungsi sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat.



Kawasan Danau Toba, yang meliputi tujuh kabupaten (Toba, Samosir, Humbang Hasundutan, North Tapanuli, Karo, Dairi, dan Simalungun), memiliki posisi yang sangat strategis dalam konstelasi pembangunan nasional. Penetapan Danau Toba sebagai salah satu dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) oleh Pemerintah Pusat membawa konsekuensi logis berupa peningkatan aliran dana melalui APBN maupun APBD. Namun, meskipun kucuran anggaran terus meningkat, tantangan dalam meningkatkan indeks kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut masih sangat kompleks. Fenomena ini memunculkan pertanyaan krusial: Sejauh mana pengeluaran pemerintah tersebut benar - benar mampu mentransformasi taraf hidup masyarakat lokal di sekitar Danau Toba ?

Secara teoretis, hubungan antara pengeluaran pemerintah dan kesejahteraan sering kali dikaitkan dengan model pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Paul Romer dan Robert Lucas, yang menekankan pentingnya investasi pada sumber daya manusia (human capital). Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan dianggap sebagai investasi jangka panjang yang akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, belanja modal untuk infrastruktur berfungsi sebagai katalisator yang menurunkan biaya logistik dan membuka akses pasar bagi masyarakat perdesaan di sekitar Danau Toba.

Namun, di sisi lain, hukum Wagner (Wagner's Law) menyatakan bahwa seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita suatu negara atau daerah, maka peran pemerintah melalui pengeluaran publik juga akan cenderung meningkat. Di kawasan Danau Toba, peningkatan pengeluaran pemerintah seharusnya linier dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan instrumen yang paling diakui secara nasional dalam mengukur kesejahteraan melalui tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Kawasan Danau Toba menghadapi paradoks pembangunan yang unik. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur megah seperti jalan tol, renovasi pelabuhan, dan pengembangan objek wisata dilakukan secara masif. Di sisi lain, masyarakat lokal masih menghadapi masalah dasar seperti akses air bersih di beberapa titik perbukitan, kualitas pendidikan yang belum merata, serta ketergantungan yang tinggi pada

sektor pertanian tradisional yang rentan terhadap perubahan iklim.

Pengeluaran pemerintah daerah di tujuh kabupaten ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada kabupaten yang sangat menitikberatkan pada belanja pegawai, sementara porsi belanja publik untuk pemberdayaan masyarakat masih relatif kecil. Ketimpangan alokasi ini dikhawatirkan akan menciptakan "pertumbuhan tanpa pembangunan" (growth without development), di mana infrastruktur fisik meningkat namun kualitas hidup manusia tetap stagnan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk melihat apakah pengeluaran pemerintah di sektor - sektor kunci (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kawasan ini.

Terdapat inkonsistensi hasil dari penelitian terdahulu. Penelitian oleh Prasetyo (2020) di beberapa wilayah Indonesia menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap IPM. Namun, studi yang dilakukan oleh Handayani & Syofyan (2022) menemukan bahwa di beberapa daerah otonom, pengeluaran kesehatan justru tidak memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan karena ineffisiensi birokrasi dan kebocoran anggaran.

Sebagian besar penelitian mengenai dampak pengeluaran pemerintah dilakukan pada tingkat nasional atau provinsi secara umum. Masih sangat terbatas penelitian yang melakukan analisis spesifik pada wilayah yang memiliki status sebagai "Kawasan Strategis Pariwisata Nasional" seperti Danau Toba. Karakteristik geografis yang unik (wilayah perairan dan pegunungan) serta status hukum sebagai kawasan super prioritas menciptakan dinamika fiskal yang berbeda dari wilayah non-wisata lainnya.

Indeks pembangunan manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sekawasan Danau Toba juga termasuk paling cepat kenaikannya. Dapat dilihat di atas bahwa indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sekawasan Danau Toba pada tahun 2015 sebesar 69,7% dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 72,82%. Hal tersebut berarti kinerja pemerintah di Kabupaten Sekawasan Danau Toba menunjukkan performa yang baik. Jadi indeks pembangunan manusia di Indonesia, Sumatera Utara dan Kabupaten



Sekawasan Danau Toba mengalami peningkatan setiap tahunnya.



Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sekawasan Danau Toba, Periode 2015-2022

Sekawasan Danau Toba meliputi beberapa kabupaten yaitu kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, kabupaten Humbang Hasundutan, kabupaten Karo, kabupaten Pakpak Bharat, kabupaten Simalungun, kabupaten Tapanuli Utara, dan kabupaten Dairi. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sekawasan Danau Toba yang terjadi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang baik. Dapat dilihat di atas indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sekawasan Danau Toba pada tahun 2022 data yang paling tinggi adalah daerah kabupaten Toba yaitu sebesar 75,96%. Sedangkan di Kabupaten Sekawasan Danau Toba yang memiliki nilai indeks pembangunan manusia terendah yaitu Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 68,65%.

Alokasi anggaran bidang pendidikan ini secara garis besar digunakan untuk bea siswa, menggaji tenaga pendidik, serta dana abadi pendidikan. Anggaran pendidikan melalui pembiayaan di antaranya dimanfaatkan untuk dana abadi pendidikan (termasuk untuk dana abadi pesantren), dana abadi aset, dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi kebudayaan. Anggaran pendidikan untuk bea siswa yaitu seperti Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Untuk jaminan kesejahteraan, pemerintah memberikan program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan. Di dalamnya terdapat komponen yang memberikan tambahan kepada keluarga yang memiliki anak usia sekolah.

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia. Manusia tidak akan dapat beraktivitas dengan baik jika mengalami gangguan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu pelayanan public yang disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus

direncanakan sedemikian rupa oleh pemerintah (Fadliyah 2019). Dalam menciptakan manusia yang produktif, kesehatan merupakan hal atau bagian dari kehidupan yang harus selalu dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Agar kualitas kesehatan masyarakat tetap terjamin pemerintah perlu untuk mengalokasikan sejumlah dana untuk berbagai keperluan dan hal dibidang kesehatan seperti tenaga medis, obat-obatan, puskesmas dan rumah sakit.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pengembangan perekonomian Indonesia. Sektor pariwisata memberi dampak yang sangat besar bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berada di Sekawasan atau lokasi yang menjadi tujuan wisata. Salah satu program perencanaan pembangunan yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah pengembangan sektor pariwisata karena menganggap bahwa sektor pariwisata adalah satu sektor strategis dalam pengembangan perekonomian daerah sesuai dengan potensi yang mereka miliki. (Aliansyah dan Hermawan, 2019).

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik, yaitu secara langsung berupa "pembayaran transfer", dan secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dan sebagainya (Nahumuri, 2019).

Banyak penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pengeluaran secara total. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan membedah pengeluaran berdasarkan fungsi (pendidikan, kesehatan, dan pariwisata) serta melihat dampaknya secara simultan terhadap komponen-komponen penyusun IPM di delapan kabupaten sekawasan Danau Toba, guna memberikan gambaran yang lebih detail mengenai efektivitas anggaran sektor mana yang paling dominan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sekawasan Danau Toba".

TINJAUAN PUSTAKA Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik (2005), indikator yang digunakan



untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan yaitu pendapatan, konsumsi atau pendapatan keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anda kejenjang pendidikan, kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Pemerintah mempunyai kewenangan besar dalam pengelolaan fiskal untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan hidup yang layak.

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (purchasing power parity). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Tetapi, hendaknya disadari bahwa proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional bruto (GNP) adalah suatu ukuran yang sangat kasar terhadap kegiatan/peranan pemerintah dalam suatu bentuk perekonomian (Ujianto, 2017: 81).

Pengeluaran pemerintah (Government Expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD) untuk daerah. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi (Nahumuri, 2019).

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam peningkatan sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap fertilitas (angka kelahiran) masyarakat. Dengan pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam kehidupan. Jadi, pada umumnya pendidikan diakui sebagai investasi sumber daya manusia. Pendidikan memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan kehidupan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap serta produktivitas.

Menurut Pasal 1 butir 40 Undang-Undang No.4 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas dasar UU No. 22 Tahun 2011 Tentang APBN 2012, mengatakan bahwa anggaran dalam sektor pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi dalam pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga. Alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan. Untuk ingin membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab oleh pemerintah.

Ketersediaan fasilitas pelayanan baik fisik maupun non fisik sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan di suatu daerah, dalam bidang fisik seperti ketersediaan sarana standart dalam pembangunan gedung pendidikan maupun sarana laboratorium, juga bidang non fisik seperti besar adanya bantuan biaya pendidikan. Pemerintah harus lebih fokus terhadap pendidikan sebagai faktor penting dalam meningkatkan pembangunan nasional. Jika halnya terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah dari sektor pendidikan. Pemerintah menyediakan anggaran minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bidang pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tercantum Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 bahwa mengatakan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), (Nasution, 2021).

Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Kesehatan adalah salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan suatu masyarakat. Melalui alokasi pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat di Indonesia untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Beberapa program yang telah dilakukan pemerintah untuk mempermudah masyarakat mengakses pelayanan kesehatan adalah program kesehatan gratis, asuransi kesehatan, dan penggunaan kartu miskin (Andiny, 2018).

Sektor kesehatan meliputi jaringan rumah sakit, farmasi, laboratorium, dan fasilitas kesehatan lainnya yang menyediakan jasa untuk menjaga dan memulihkan kesehatan masyarakat luas. Di bidang kesehatan, Dirjen Anggaran menuturkan pemerintah mendukung imunisasi dasar serta pencegahan dan pengendalian penyakit. Kemudian, terdapat pemberian bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional, layanan kesehatan ibu dan anak, hingga pemenuhan gizi ibu dan anak.

Menurut Undang-Undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan terdapat Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 Pasal 71 ayat 2 mengatakan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah daerah, provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 % dari APBD diluar gaji. Salah satu sistem kesehatan nasional adalah sistem pembiayaan kesehatan.

Kesehatan merupakan dasar dari produktivitas kerja dan kapasitas belajar di sekolah baik pada tingkat individual maupun keluarga. Tenaga kerja akan lebih produktif dalam bekerja ketika mereka sehat secara fisik dan mental dibandingkan mereka yang kurang sehat. Keadaan seperti ini sering terjadi pada negara-negara sedang berkembang, dimana proporsi terbesar dari angkatan kerja masih melakukan pekerjaannya secara manual (Nasution, 2021).

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pariwisata

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai manfaat terhadap masyarakat setempat dan sekitarnya. Bahkan pariwisata dikatakan mempunyai energi yang luar biasa yang mampu membuat masyarakat mengalami perubahan dalam berbagai aspeknya. Pariwisata mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat bahkan Negara sekalipun. Manfaat pariwisata dapat dilihat dari berbagai aspek atau

segi yaitu manfaat pariwisata dari segi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan ilmu pengetahuan, serta peluang dan kesempatan kerja guna memerangi angka kemiskinan.

Menurut Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan Bab I Pasal 1; dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Pariwisata merupakan proses perjalanan yang dilakukan oleh perorangan, perkeluarga maupun per komunitas tertentu dari satu tempat asalnya ke tempat lain yang menjadi destinasi perusahaan tersebut. Dengan tujuan masing-masing yang tentunya akan beragam keinginan yang ingin didapat, misalnya untuk keperluan refreshing, berlibur, bersantai, atau ada juga yang berbisnis sekalian berlibur ke suatu tempat

METODE PENELITIAN

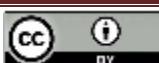
Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sekawasan Danau Toba, tentang pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sekawasan Danau Toba melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Waktu penelitian dilaksanakan Januari 2025 – Mei 2025.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menentukan keterangan mengenai Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan Sektor Pariwisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sekawasan Danau Toba.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan instansi lain yang terkait yang berada di Kabupaten Sekawasan Danau Toba.

Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Kesejahteraan Masyarakat (Y), merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan masyarakat baik itu kebutuhan secara materil dan non materil yang di ukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sekawasan Danau Toba.
2. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X1), adalah besarnya pengeluaran pemerintah dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja



- Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran di sektor pendidikan di Kabupaten Sekawasan Danau Toba.
3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X2), adalah besarnya pengeluaran pemerintah dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran di sektor kesehatan di Kabupaten Sekawasan Danau Toba.
4. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pariwisata (X3), adalah besarnya pengeluaran pemerintah dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran di sektor pariwisata di Kabupaten Sekawasan Danau Toba.

Analisis regresi data panel adalah gabungan antara data runut waktu (time series) dan data silang (cross section). Data dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak unit amatan disebut data lintas individu, sementara itu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, maka bentuk umum yang digunakan dari model regresi data panel adalah:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y: Kesejahteraan Masyarakat (Persen)

X₁: Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (Rupiah)

X₂: Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (Rupiah)

X₃: Pengeluaran Pemerintah Sektor Pariwisata (Rupiah)

α : Konstanta

β_1 : Koefisien Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

β_2 : Koefisien Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

β_3 : Koefisien Pengeluaran Pemerintah Sektor Pariwisata

i: 8 Kabupaten di Kabupaten Sekawasan Danau Toba

t: Periode Waktu Penelitian

e: Tingkat Kesalahan (eror)

PEMBAHASAN

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	110.825114	(7,53)	0.0000
Cross-section Chi-square	175.978096	7	0.0000

Sumber: Hasil Olah Data, 2025

Berdasarkan hasil uji chow pada table 1

menunjukkan bahwa nilai probabilitas $< 0,05$ ($0,0000 < 0,05$) maka H_0 ditolak. Oleh karena itu model yang paling tepat digunakan adalah fixed effect. Maka, selanjutnya akan dilakukan regresi dengan model random effect.

Dalam hal ini perlu dilakukan uji hausman untuk menguji model yang tepat digunakan antara fixed effect atau random effect. Oleh karena itu, berikut hasil uji hausman.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.990547	3	0.1121

Sumber: Hasil Olah Data, 2025

Berdasarkan uji hausman pada table 2 menunjukkan bahwa nilai probabilitas $> 0,05$ ($0,1121 > 0,05$) maka H_0 diterima. Oleh karena itu model yang paling tepat digunakan adalah random effect.

Dalam hal ini perlu dilakukan uji LM untuk menguji model yang tepat digunakan antara random effect atau common effect. Oleh karena itu, berikut hasil uji LM.

Tabel 3. Hasil Uji LM

	Cross-section One-Sided	Period One-Sided	Both
Breusch-Pagan	110.3221 (0.0000)	0.273983 (0.6007)	110.5961 (0.0000)

Sumber: Hasil Olah Data, 2025

Berdasarkan hasil uji LM pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai probabilitas $< 0,05$ ($0,0000 < 0,05$) maka H_0 ditolak. Oleh karena itu model yang paling tepat digunakan adalah random effect.

Berdasarkan hasil dari uji chow, uji hausman dan uji LM, maka model yang terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM)

Hasil Regresi Data Panel

Tabel 4. Hasil Regresi Panel Data

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	32.24910	6.682764	4.825713	0.0000
LN X1	-2.305919	0.319231	-7.223351	0.0000
LN X2	3.885453	0.305886	12.70230	0.0000
LN X3	0.012667	0.174820	0.072456	0.9425

Hasil pada uji t pada variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki probabilitas 0.0000 dimana probabilitasnya $<$



0,05, maka dapat disimpulkan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) di kabupaten seKabupaten Sekawasan Danau Toba, yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil pada uji t pada variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki probabilitas 0.0000 dimana probabilitasnya $< 0,05$, maka dapat disimpulkan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) di kabupaten seKabupaten Sekawasan Danau Toba, yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil pada uji t pada variabel pengeluaran pemerintah sektor pariwisata memiliki probabilitas 0.9425 dimana probabilitasnya $> 0,05$, maka dapat disimpulkan pengeluaran pemerintah sektor pariwisata tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) di kabupaten seKabupaten Sekawasan Danau Toba, yang artinya H_0 diterima dan H_a ditolak.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X_1) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (IPM) di Kabupaten Sekawasan Danau Toba

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam peningkatan sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan bangsa. Pendidikan memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan kehidupan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap serta produktivitas. Hal tersebut terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah sektor pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tercantum Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 bahwa mengatakan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

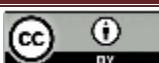
Beberapa teori yang menjelaskan hubungan antara pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dengan kesejahteraan masyarakat. Pertama, teori fungsi produksi pendidikan dimana teori ini mengeksplorasi bagaimana kombinasi berbagai input pendidikan (termasuk pengeluaran pemerintah) menghasilkan output pendidikan, seperti prestasi akademis atau kemampuan kognitif siswa. EPF menunjukkan bahwa peningkatan input, termasuk pengeluaran

pemerintah, dapat meningkatkan output pendidikan dan berpotensi mengarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, teori modal manusia dimana teori ini menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan menghasilkan "modal manusia" yang berupa keterampilan dan pengetahuan. Peningkatan modal manusia ini diharapkan akan meningkatkan produktivitas individu, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, teori ekonomi kesejahteraan dimana teori ini menekankan pada intervensi pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya untuk tujuan-tujuan kesejahteraan sosial, termasuk pendidikan. Menurut pandangan ini, pengeluaran pendidikan oleh pemerintah kontribusi terhadap kesejahteraan total masyarakat dengan cara menyediakan fasilitas pendidikan yang merata, meningkatkan kesetaraan kesempatan, dan mengurangi kemiskinan. Keempat, teori efisiensi vs. ekuitas dimana teori ini mempertimbangkan trade-off antara alokasi sumber daya yang efisien (mendapatkan hasil maksimal dari sumber daya yang tersedia) dan tujuan ekuitas (mendistribusikan sumber daya secara merata di antara populasi).

Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) di Kabupaten Sekawasan Danau Toba bahwa koefisien 32.2491 dengan tanda positif artinya bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di Kabupaten Sekawasan Danau Toba mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM).

Uji t digunakan untuk membuktikan pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) secara parsial dalam pengujian ini dapat dibuktikan dengan membandingkan nilai probabilitas dengan taraf signifikansi 0,05. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Dari hasil pengolahan data sebelumnya dapat diperoleh nilai probabilitasnya untuk variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan sebesar 0.0000 dimana probabilitasnya $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) di Kabupaten Sekawasan Danau Toba, yang artinya H_0 ditolak H_a diterima.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya



yaitu (Aditia et al., 2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X_2) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (IPM) di Kabupaten Sekawasan Danau Toba

Kesehatan adalah salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan suatu masyarakat. Melalui alokasi pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat di Indonesia untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Pasal 71 ayat 2 mengatakan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah daerah, provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 % dari APBD diluar gaji.

Beberapa teori yang menjelaskan hubungan antara pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan dengan kesejahteraan masyarakat. Pertama, teori modal manusia dimana teori ini berpendapat bahwa kesehatan adalah komponen penting dari modal manusia. Investasi pemerintah dalam kesehatan diharapkan meningkatkan kualitas dan harapan hidup tenaga kerja, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Kedua, teori public goods dimana kesehatan dianggap sebagai barang publik dalam beberapa aspek, seperti pencegahan penyakit menular. Teori ini menyarankan bahwa pengeluaran pemerintah untuk barang-barang semacam itu diperlukan karena pasar bebas seringkali tidak dapat menyediakannya secara efisien. Ketiga, teori ekonomi kesejahteraan dimana teori ini fokus pada bagaimana pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menyediakan layanan kesehatan yang merata dan mencegah ketidaksetaraan kesehatan, yang bisa disebabkan oleh kemampuan membayar yang berbeda. Keempat, teori eksternalitas dimana ketika tindakan individu atau perusahaan memiliki efek samping (eksternalitas) terhadap orang lain yang tidak terlibat dalam aktivitas itu, intervensi pemerintah dibenarkan untuk mengoreksinya. Pengeluaran pada kesehatan umum memiliki eksternalitas positif seperti pengurangan penyebaran penyakit. Kelima, teori asuransi sosial dimana teori ini berpendapat bahwa pemerintah harus menyediakan jaminan sosial untuk melindungi individu dari risiko yang tidak terduga atau tidak diinginkan, seperti sakit atau kecelakaan. Keenam, teori Grossman's Model of

Health Capital dimana model ekonomi ini menyamakan kesehatan dengan bentuk modal yang dapat dikonsumsi dan juga diinvestasikan. Investasi dalam kesehatan, seperti pengeluaran pemerintah pada layanan kesehatan dan dianggap meningkatkan modal Kesehatan.

Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) di Kabupaten Sekawasan Danau Toba bahwa koefisien 32.2491 dengan tanda positif artinya bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan di Kabupaten Sekawasan Danau Toba mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM).

Uji t digunakan untuk membuktikan pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) secara parsial dalam pengujian ini dapat dibuktikan dengan membandingkan nilai probabilitas dengan taraf signifikansi 0,05. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Dari hasil pengolahan data sebelumnya dapat diperoleh nilai probabilitasnya untuk variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan sebesar 0,0000 dimana probabilitasnya $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) di Kabupaten Sekawasan Danau Toba, yang artinya H_0 ditolak H_a diterima.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu (Aditia et al., 2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pariwisata (X_3) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (IPM) di Kabupaten Sekawasan Danau Toba

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai manfaat terhadap masyarakat setempat dan sekitarnya. Manfaat pariwisata dapat dilihat dari berbagai aspek atau segi yaitu manfaat pariwisata dari segi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan ilmu pengetahuan, serta peluang dan kesempatan kerja guna memerangi angka kemiskinan.

Berdasarkan literatur umum ekonomi dan pariwisata, ada beberapa pendekatan teoretis yang dapat memberikan kerangka pemahaman tentang



hubungan antara pengeluaran pemerintah sektor pariwisata dengan kesejahteraan masyarakat. Pertama, teori pertumbuhan endogen dimana teori ini menyatakan bahwa investasi dalam pengetahuan, inovasi, dan modal manusia, termasuk pariwisata, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara internal. Pengeluaran pemerintah dalam sektor pariwisata, misalnya melalui promosi, infrastruktur, atau pendidikan, dapat merangsang aktivitas ekonomi lokal dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Kedua, teori penyebaran ekonomi dimana teori ini menjelaskan bahwa pengeluaran dalam industri tertentu dapat memiliki efek spillover pada sektor lain. Dalam pariwisata, investasi pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan untuk berbagai sektor yang berhubungan, seperti perhotelan, kuliner, dan transportasi, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, teori modal manusia dimana investasi pemerintah dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi tenaga kerja pariwisata juga dapat dianggap sebagai peningkatan modal manusia, yang tidak hanya meningkatkan kualitas layanan pariwisata tetapi juga prospek jangka panjang bagi karyawan, dengan demikian meningkatkan kesejahteraan mereka. Keempat, teori multiplier effect dimana pariwisata diketahui memiliki efek pengganda yang tinggi, di mana pengeluaran pengunjung menyebar melalui ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan dan permintaan untuk barang dan jasa lokal, dan dengan demikian meningkatkan keseluruhan kesejahteraan Masyarakat.

Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) di Kabupaten Sekawasan Danau Toba bahwa koefisien 32,2491 dengan tanda positif data panel dengan menggunakan aplikasi Eviews. Adapun persamaan artinya bahwa pengeluaran pemerintah sektor pariwisata di Kabupaten Sekawasan Danau Toba mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM).

Uji t digunakan untuk membuktikan pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) secara parsial dalam pengujian ini dapat dibuktikan dengan membandingkan nilai probabilitas dengan taraf signifikansi 0,05. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Dari hasil pengolahan data sebelumnya dapat diperoleh nilai probabilitasnya

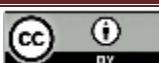
untuk variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan sebesar 0,9425 dimana probabilitasnya $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pariwisata tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) di Kabupaten Sekawasan Danau Toba, yang artinya H0 diterima Ha ditolak.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu (Natalia, 2018) penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan jumlah hotel, kenaikan jumlah restaurant dan rumah makan dan kenaikan jumlah biro dan nagen pariwisata berpengaruh positif signifikan, sedangkan jumlah wisatawan berpengaruh negatif dan kenaikan jumlah ukm tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan Masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada data penelitian ini, penulis memperoleh kesimpulan bahwa: variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat (IPM) di Kabupaten Sekawasan Danau Toba; variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat (IPM) di Kabupaten Sekawasan Danau Toba; dan variabel pengeluaran pemerintah sektor pariwisata tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat (IPM) di Kabupaten Sekawasan Danau Toba. Serta variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X2) dan pengeluaran pemerintah sektor pariwisata (X3) dapat dijelaskan bahwa variabel kesejahteraan masyarakat (IPM) di Kabupaten Sekawasan Danau Toba sebesar 71,65 % sedangkan sisanya sebesar 28,35% dipengaruhi oleh variabel-variabel diluar penelitian ini.

Saran dari penelitian ini Adalah dari hasil penelitian menunjukkan peran pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sekawasan Danau Toba, untuk itu pemerintah harus menjaga kenaikan dan meningkatkan lagi anggaran pendidikan agar kesejahteraan masyarakat (IPM) di Kabupaten



Sekawasan Danau Toba terus meningkat, Dari hasil penelitian menunjukkan peran pengeluaran pemerintah sektor kesehatan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sekawasan Danau Toba, untuk itu pemerintah harus menjaga kenaikan dan meningkatkan lagi anggaran kesehatan agar kesejahteraan masyarakat (IPM) di Kabupaten Sekawasan Danau Toba terus meningkat, dan juga peran pengeluaran pemerintah sektor pariwisata mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sekawasan Danau Toba, untuk itu pemerintah harus menjaga kenaikan dan meningkatkan lagi anggaran pariwisata agar kesejahteraan masyarakat (IPM) di Kabupaten Sekawasan Danau Toba terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansyah, Helmi, Hermawan, Wawan, 2019. Peran Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. *Bina Ekonomi*, Vol. 23. No.1.
- Andiny, Puti., Sari, Merlindiana Gus Puja, 2018. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 2. No. 2, Oktober 2018.
- Apriyanti, Masayu Endang.,Hatkoko, Bondan Dwi, 2023. Pengaruh Sektor Pariwisata dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Sosio e-Kons*, Vol. 15. No. 1, April 2023.
- Basri, Yuswar Zainul., Subri, Mulyadi, 2005. Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Damanik, Darwin, dkk, 2022. Ekonomi Pariwisata: Konsep, Pemasaran dan Pembangunan. Yayasan Kita Menulis.
- Dumairy, M.A, 2018. Perekonomian Indonesia. Jakarta. Erlangga.
- Fadliyah, Chairati, Triani, Mike, 2019. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 1.No. 3.
- Ismail, Munawar, dkk, 2018. Sistem Ekonomi Indonesia. Jakarta. Erlangga.
- Mankiw, N. Gregory, 2021. Makro Ekonomi. Jakarta. Erlangga.
- Nahumuri, L.L,2019. Esensi dan Urgensi Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah, *Jurnal Ilmu pemerintahan Suara Khatulistiwa*, Vol. 4.No. 1.
- Nasution, Diwayana Putri., dkk,2021. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Medan. Vol.14 No. 1, Juni 2021.
- Panjaitan, Pawer Darasa, dkk, 2024. Pengantar Ekonomi Makro. Batam.CV. Rey Media Grafika.
- Panennunggi, Maddaremmeng A, 2017. Perekonomian Indonesia. Depok. Yayasan Obor Indonesia.
- Purba, Elidawaty, dkk, 2021. Metode Penelitian Ekonomi. Yayasan Kita Menulis.
- Putra, Windhu, 2020. Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. Depok. Rajawali Pers.
- Rahayu, Sri Endang, dkk, 2018. Perekonomian Indonesia. Medan. Perdana Publishing.
- Sitompul, Rosalinda Septiani, dkk, 2023. Metode Penelitian Bisnis. Medan. Yayasan Kita Menulis.
- Sun'an, DR. Muammil, Senuk, Abdurrahman, 2015. Ekonomi Pembangunan Daerah. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sope, Indra Imelda., dkk, 2019. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(1).
- Triwibowo, Cecep, Pusphandani, Mitha Erlisya, 2015. Pengantar Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Yogyakarta. Nuha Medika.
- Ujianto, H., dkk 2017. Keuangan Negara. Surabaya. Indomedia Pustaka

